

Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)<http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>

Vol. 06 No. 02 November 2019: 162 – 177

e-ISSN 2407-3709 p-ISSN 2355-438X

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI
INDONESIA
(Ikhtiar Strategis Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan)****Muchamat Amarodin***Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung*Amarudin009@gmail.com

Abstrak: Dealektika tentang wakaf, tidak dapat dilepaskan dengan cita-cita kesejahteraan umat. Akan tetapi mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena kesejahteraan tidak hanya meliputi satu ataupun dua aspek saja akan tetapi juga harus melihat kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Agar wakaf di Indonesia mampu berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, maka sudah saatnya di Indonesia dirumuskan berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf khususnya tentang harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf, nadzir wakaf dan cara pengelolaan wakaf

Kata kunci: Optimalisasi, Pemberdayaan, Wakaf Produktif, Ikhtiar Strategis dan Ekonomi Keumatan.

Abstract: Dealektika about waqf, cannot be released with the aspirations of the welfare of the people. However, realizing this is not an easy thing to do, because welfare does not only include one or two aspects, but also must look at the conditions, including implementing some fundamental principles in life and community and national life. So that waqf in Indonesia is able to develop well and can truly improve the social and economic welfare of the ummah, then it is time in Indonesia to formulate various matters relating to waqf, especially regarding assets that may be represented, the designation of waqf, nadzir waqf and how to manage endowments.

Keywords: Optimization, Empowerment, Productive Waqf, Strategic Efforts and Public Economics.

Pendahuluan

Wakaf telah disayariatkan serta diamalkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, termasuk umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu perwakafan merupakan hal yang penting dalam upaya hubungan antara hukum Islam dan nasional. Dikatakan penting karena wakaf sendiri merupakan sebuah amalan-amalan kegiatan keagamaan baik dalam bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai sebuah pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual atau materiil menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Kita tahu bahwa wakaf juga memiliki peran penting dalam ekonomi dan sosial wakaf juga memainkan peran ekonomi serta sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf memiliki fungsi sebagai sumberdaya pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah, pengkajian

serta penelitian, rumah-rumah sakit dan pelayanan sosial.¹ Sementara di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yakni sebelum Indonesia merdeka, pasalnya di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam.

Berbicara soal wakaf, tidak dapat dilepaskan dengan cita-cita kesejahteraan umat. Akan tetapi mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena kesejahteraan tidak hanya meliputi satu ataupun dua aspek saja akan tetapi juga harus melihat kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Agar wakaf di Indonesia mampu berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, maka sudah saatnya di Indonesia dirumuskan berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf khususnya tentang harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf, nadzir wakaf dan cara pengelolaan wakaf.²

Wakaf produktif menjadi sebuah upaya pemanfaatan aset wakaf yang sifatnya kekal, abadi serta berkelanjutan bahkan ketika pemiliknya meninggal dunia jika aset yang dimaksud masih dimanfaatkan maka akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi pemilik aset yang dimaksud. Pengembangan wakaf produktif sebagai paradigma baru, akhir-akhir ini terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dan terus melakukan inovasi melalui pengadaan program-program yang dilakukan oleh berbagai nazir wakaf.

Adanya Badan Wakaf Indonesia serta lembaga lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Adalah bagian dari kepedulian umat terhadap kondisi umat dan salah satu peran negara dalam memegang *role of Islamic economy* untuk mensejahterakan masyarakatnya.³ Hal ini juga sejalan dengan apa yang diterangkan Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya ayat 107 bahwa kesejahteraan dapat diperoleh tidak hanya melalui hubungan dengan Allah yang bersifat *transidental/habluminallah* akan tetapi juga melalui hubungan manusia dengan manusia yang bersifat *horizontal/habluminannas*.

Potensi besar yang dimiliki wakaf di Indonesia memiliki peluang untuk ikut berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mengoptimalkan wakaf uang sebagai salah satu dari upaya pembiayaan pembangunan infrastruktur.⁴

¹ Syamsul Anwar, “*Studi Hukum Islam Kontemporer*”, cet ke-1, (Jakarta: RM Books, 2007), 75.

² Depag RI, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006, 75

³ Nasrulloh Ali Munif, *Critical Analysis of Abu Yusuf Thought: The Role of Government in Islamic Economic*, Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah) STAI Muhammadiyah Tulungagung, Vol. 07 No. 01 Edisi Juni 2019. 18

⁴ Fuadi. (2018). *Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*. *Economica*, 9(1), 151-177.

Pemberdayaan wakaf menjadi sebuah upaya pemanfaatan hasil dari wakaf yang berkelanjutan serta strategis bagi peruntukan wakaf. Upaya dari pemberdayaan wakaf produktif adalah sebuah upaya memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran melalui hasil dari wakaf tunai atau wakaf uang.

Upaya tersebut tidak hanya bertumpu kepada aset wakafnya sendiri, akan tetapi juga kepada kemampuan dan kualitas nadzir wakaf dalam mengelola, memproduktifkan atau mengembangkan aset wakaf yang dimaksud sesuai dengan konsep pemberdayaan itu sendiri, partisipasi, kelembagaan dan kelompok yang merupakan aspek penting yang harus dilakukan.

Terdapat beberapa aspek penting sebagai sebuah upaya dalam mewujudkan keberhasilan kesejahteraan ekonomi keumatan melalui pemberdayaan wakaf produktif diantaranya adalah optimalisasi nadzir dan optimalisasi pemahaman tentang wakaf produktif/re-interpretasi wakaf produktif. Dengan ini diharapkan wakaf bisa menjadi tonggak kesejahteraan bagi umat.

Metode

Metode yang digunakan dalam *mini paper* ini adalah pendekatan *konseptual-empiris*. Dua pendekatan ini dirasa tepat untuk mengkaji bagaimana optimalisasi wakaf produktif sebagai ikhtiar meningkatkan kesejahteraan umat. Fakta empiris juga dibutuhkan guna menguatkan teori konseptual yang digunakan.

Pengertian Wakaf Produktif

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab yakni *al-waqf*, yang artinya menahan atau menghentikan. Adapun kata lain yang sering digunakan dengan kata wakaf adalah *al-hubus* (jamaknya *al-ahbas*), yang artinya sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Sedangkan Kata wakaf dalam hukum Islam memiliki dua arti: arti kata kerja tindakan wakaf dan arti kata benda diwakafkan (*al-muaquf bih*) atau digunakan dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang digunakan dalam perundang-undangan Mesir. Sementara di Indonesia, istilah wakaf dapat memiliki makna objek yang diwakafkan atau institusi. Dengan kata lain dalam

arti kata benda wakaf memiliki arti ialah benda wakaf. Apabila dikatakan *wakaf* tidak dapat dijual artinya *benda wakaf* tidak dapat dijual.⁵

Secara terminologis dalam hukum Islam, sesuai dengan definisi yang paling banyak dianut, wakaf diartikan sebagai melembagakan sebuah benda yang dapat diambil manfaatnya dengan cara menghentikan hak yang bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda yang dimaksud dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau kepentingan sosial kebaikan. Ada juga yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan sebuah benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selama-selamanya dan mendonasikan manfaat hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan.⁶

Adapun hubungannya dengan kata “*produktif*” bahwa dalam ilmu manajemen terdapat sebuah mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses pengubahan/transformatasi *input* menjadi *output* guna menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa: pengubahan fisik, meminjamkan, menyimpan dan memindahkan.⁷ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wakaf yang profesional guna meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

Sementara itu definisi wakaf dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yang dinamakan dengan wakafa adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yakni yang berupa tanah milik serta melembagakan selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁸ Dalam KHI/Kompilasi Hukum Islam menerangkan lebih sederhana namun lebih jelas, yakni yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif guna memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan

⁵Juhaya S. Praja, “*Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*”. (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 6

⁶Ibid.

⁷Jaih Mubarak, “*Wakaf Produktif*”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 15.

⁸Lihat PP No 28 Tahun 1977.

⁹Lihat, KHI Pasal 215 ayat (1). Meski KHI bersifat *fakultatif* dalam penerapan peraturannya, namun merupakan presentasi dari pendapat para jumbuh ulama’ (hukum Islam) yang mendapat legitimasi oleh negara. Lihat, Nasrulloh Ali Munif, *KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Visa a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter)*, Ahkam: Jurnal Hukum Islam IAIN Tulungagung, Volume 3 No 2 Edisi November 2015. hal.269

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah serta kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰ Di dalam UU tersebut tidak termaktub klausula selama-lamanya seperti halnya yang termuat didalam KHI, karena Undang-Undang ini, wakaf tidak abadi akan tetapi terdapat kemungkinan untuk selama waktu tertentu.

Dari beberapa perbedaan definisi di atas, meski didalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat penyebutan kata produktif, akan tetapi dapat dipahami bahwa makna dari wakaf dan wakaf produktif adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Akan tetapi, dalam pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi namun juga pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh apabila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.

Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif

Optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif dilakukan melalui dua aspek yakni aspek pengelolaan wakaf dan aspek penyaluran atau pemanfaatan hasil wakaf. Kesemuanya akan kita uraikan sebagai berikut:

Pertama, pada aspek pengelolaan wakaf. Pada praktik pemberdayaan wakaf produktif, nazir wakaf dapat mengelola aset wakafnya sesuai dengan jenis harta benda wakaf yang dimasud. Sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, inovasi model pemberdayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan wakaf pada benda yang tak bergerak

Yang termasuk kedalam wakaf benda tak bergerak antara lain tanah, bangunan atau rumah. Dalam bidang pertanian atau perkebunan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan mati atau tidak terurus atau lahan milik masyarakat guna pengelolaan wakaf secara terpadu. Wakaf terpadu merupakan model pengelolaan wakaf gabungan antara pertanian/perkebunan dan peternakan yang berjalan berbarengan baik secara sisi produksi dan distribusi.

Hasil dari pengelolaan wakaf yang dimaksud digunakan guna membiayai pemberdayaan masyarakat kurang mampu atau terkena bencana alam. Tidak hanya mendapatkan keuntungan berupa materi, masyarakat yang dimaksud juga

¹⁰Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

mendapatkan kemampuan yang dimiliki sehingga mereka nantinya dapat kembali hidup dengan sejahtera dan mandiri.

Sebagai negara agraris, konsep dari pemberdayaan model seperti ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dapat memproduksi sumber daya yang ada secara mandiri, sehingga masyarakat yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus bergantung kepada bantuan-bantuan langsung lainnya. Adapun yang menjadi harapan besarnya apabila program pengelolaan wakaf model seperti ini berkembang pesat di masyarakat maka dapat membantu negara dalam mengurangi produk impor dan dapat meningkatkan ekspor.

Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan guna untuk meningkatkan adalah dengan cara menggunakan akad muzaraah. Konsep muzaraah sendiri merupakan konsep perjanjian antara dua belah pihak, yakni pemerintah daerah sebagai pengelola wakaf tanah serta petani sebagai pihak yang mengelola tanah dari awal hingga masa panen dengan ketentuan yakni bagi hasil atau pembagian sesuai dengan kesepakatan. Pemberdayaan wakaf dengan cara muzaraah seperti ini selain diberikan bantuan yang berupa mesin atau bahkan bantuan pelatihan. Sesuai dengan kebutuhan atau sumber yang dibutuhkan.

Pemanfaatan wakaf melalui konsep muzaraah ini akan membantu masyarakat yang memiliki mata pencaharian utamanya bertani atau berkebun. Program pemberdayaan model ini akan memanfaatkan potensi keunggulan sumberdaya yang ada pada sebuah wilayah tertentu sehingga membuka peluang bagi lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

Kedua, pengelolaan aset wakaf yang berupa bangunan atau rumah susun/toko dapat dilakukan dengan cara mendirikan lembaga-lembaga yang memiliki manfaat seperti halnya koperasi syariah, lembaga ZISWAF, klinik, lembaga pendidikan dan lembaga lain dapat membuka akses serta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain dapat juga mengurangi jumlah pengangguran, adanya aset wakaf dikelola untuk pendidikan atau kesehatan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu mengakses hal-hal tertentu.

Ketiga, memanfaatkan masjid atau suar/mushola hasil wakaf tidak hanya untuk ibadah, akan tetapi juga juga digunakan sebagai dakwah syiar serta pendidikan Islam dan kegiatan produktif lainnya sehingga menimbulkan dampak pada masyarakat yang tinggal disekitar tempat ibadah yang dimaksud.

2. Pemberdayaan wakaf pada benda yang bergerak

Salah satu benda wakaf bergerak yang banyak dipraktikkan adalah wakaf tunai. Potensi wakaf tunai yang cukup menjanjikan menjadi salah satu peluang yang besar. Beberapa keunggulannya antara lain besaran untuk wakaf yang memiliki variasi, sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan wakaf jika terkendala pendapatan yang terbatas, dan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pada semua bidang bahkan infrastruktur negara juga dapat dibiayai melalui wakaf tunai yang dimaksud. Melalui pemberdayaan wakaf yang dimaksud, upaya distribusi kekayaan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal.¹¹

Harta wakaf yang disalurkan melalui pemberdayaan harus dikelola, dijaga dan dilakukan secara hati-hati dengan tujuan tidak merusak nilai pokok dan tujuan awal dalam melakukan wakaf. Adapun hubungan program pemberdayaan yang akan dijalankan terdapat dua macam sebagai bentuk ikhtiar baru dalam memberdayakan wakaf produktif melalui wakaf perusahaan dan pemberdayaan wakaf produktif melalui kewirausahaan.

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa nazir wakaf terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Hal tersebut sangat membuka peluang bagi para perusahaan guna turut andil dalam mengelola wakaf. Tidak hanya itu, adanya wakaf perusahaan dapat menjadi langkah baru dalam menghimpun serta pengelolaan wakaf benda bergerak seperti halnya wakaf tunai atau wakaf surat berharga lainnya agar dapat dikelola secara profesional.

Selanjutnya adalah pemberdayaan wakaf produktif melalui kewirausahaan, hal ini memiliki tujuan untuk sebagai bentuk upaya pengembangan sumber daya manusia, upaya peningkatan kualitas hidup, upaya pengembangan pendidikan serta teknologi pembaharu dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya. Kewirausahaan adalah sebuah proses inovasi guna mewujudkan tujuan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa upaya yang berhubungan dengan usaha atau bisnis pada kehidupan manusia.

Upaya kewirausahaan berbasis wakaf dapat dilakukan dengan memberikan akses modal ataupun akses sumber daya pada program unit usaha kecil menengah sehingga memungkinkan masyarakat untuk berdaya. Tidak hanya itu,

¹¹Zaidah, Y. (2012). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat Islam di Indonesia. *ATTARADHI: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 187-196.

mengembangkan model wakaf perusahaan yang saat ini masih belum ada di Indonesia. Adanya ikhtiar model baru wakaf melalui model wakaf perusahaan ini juga diharapkan akan memudahkan nazir dalam menyalurkan peruntukan wakafnya melalui pembiayaan-pembiayaan pada proyek-proyek tertentu dan pengelolaan wakafnya akan ditangani oleh pihak-pihak yang telah dipastikan memiliki kredibilitas dan profesionalitas.

Upaya guna mewujudkan wakaf kewirausahaan dalam masyarakat antara lain: mengembangkan berbagai program pelatihan dan pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diri dan *soft skill*, bantuan pemodalan, bantuan berbagai akses seperti halnya teknologi, dan upaya kemitraan yang dapat diterapkan pada setiap kelompok masyarakat. Adapun bagian yang terpenting didalam mengembangkan kewirausahaan yang berbasis wakaf adalah inovasi bisnis yang digunakan serta upaya dalam menghadapi berbagai resiko yang ada. Pada kelompok masyarakat, upaya pemberdayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi sumberdaya yang ada pada masyarakat yang dimaksud dan mampu menarik minat mereka.

Optimalisasi Pengembangan Benda Wakaf Secara Produktif

Kesadaran masyarakat guna mengamalkan tingkat religiusitasnya dengan cara wakaf memang cukup tinggi. Akan tetapi patut untuk disayangkan, terdapat banyak aset wakaf yang tingkat pendayagunaannya stagnan dan tidak sedikit pula yang tidak berkembang sama sekali. Adapun penyebabnya adalah umat Islam pada kebanyakan mewakafkan tanah, akan tetapi kurang memikirkan biaya operasional sekolah, sehingga yang harus dilakukan adalah dengan cara pengembangan wakaf produktif guna mengatasi problem tersebut.

Pilihan untuk menganut manajemen modern menjadi sebuah keniscayaan dan harus dilakukan dengan cara kelaziman bahwa harta benda wakaf adalah hanya harta benda tak bergerak harus segera diubah bahwa harta benda wakaf bergerak juga dapat diwakafkan serta memiliki potensi guna dikembangkan. Hubungan antara pemahaman dan keyakinan dengan kualitas nadzir yang tidak futuristik dalam mengelola aset wakaf menyebabkan potensi harta wakaf tidak dapat berkembang secara semestinya.¹²

Terkait dengan hal tersebut, hal yang harus dilakukan adalah manajemen kenaziran dan profesionalitas nazir, baik itu tentang kredibilitas yang terkait dengan kejujuran,

¹²Thalhah Hasan, "Perlu Rekonsepsi Fikih Wakaf", *Republika*, 30 April 2004.

profesionalitas yang terkait dengan kapabilitas, atau kompensasi yang terkait dengan upah pendayagunaan aset wakaf. Kemungkinan alih fungsi (rubah peruntukan) serta relokasi menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan guna pengembangan aset wakaf yang dapat juga dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi kebutuhan peruntukan aset wakaf dengan tujuan lebih produktif.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dapat juga dilakukan dengan berbagai cara. Adapun kategori produktif yang dapat dilakukan antara lain: investasi, cara pengumpulan, produksi, penanaman modal, kemitraan, agrobisnis, pertambangan dan lain sebagainya.

Didalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dibutuhkan pinjaman, maka diperlukan lembaga penjamin syariah. Lembaga tersebut merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengembangan dan pengelolaan fungsi aset wakaf secara produktif adalah upaya menghidupkan kembali harta wakaf yang statis atau cenderung mati.

Dalam rangka guna mengembangkan benda wakaf secara produktif, disini terdapat dua model pembiayaan proyek wakaf produktif, yakni secara tradisional dan institusional. Adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

1. Secara tradisional

Didalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, kitab fiqh klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi wakaf yakni: (a) pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru guna melengkapi harta wakaf yang lama, model pembiayaan seperti ini dengan menambah harta wakaf baru pada harta wakaf lama. Hal ini sudah ada sejak lama ada dalam ajaran Islam. (b) pinjaman guna pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf serta pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi dari wakaf sebagaimana semestinya. (c) penukaran pengganti/substitusi harta wakaf, dalam hal ini paling tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan oleh si wakif. (d) pembiayaan Hukr (sewa dengan waktu jangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar, ini bertujuan untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Daripada menjual harta wakaf, nazir dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan sebuah nilai nominal secara periodik. (e) pembayaran ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini terdapat dua bagian yakni berupa uang muka lump sum yang besar guna merekonstruksi harta wakaf yang

bersangkutan, dan yang kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.¹³

2. Didalam

Dalam rangka guna mengembangkan wakaf secara produktif, disini terdapat empat model iktiar pembiayaan yang memperbolehkan pengelola wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan yakni: murabahah, istisna, ijarah dan mudharabah dan berbagai kepemilikan atau syariatul al malik, yang mana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan yang disebut bagi hasil sewa berjangka panjang.

Optimalisasi Peran Nazir

Salah satu yang menjadi aspek penting dalam wakaf produktif adalah keberadaan nazir. Karena nazir wakaf memiliki wewenang untuk melakukan segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif dan aturan nazir yang berlaku.¹⁴ kualitas sumberdaya manusia yang mengelola tentang wakaf produktif menjadi sebuah hal utama bagi seorang nazir dalam mengelola wakaf. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia menjadi sebuah langkah strategis dalam memberdayakan nazir dengan berbagai cara seperti pelatihan, pemagangan dan bantuan modal. Hal ini akan sejalan dengan konsep pemberdayaan.

Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BWI adalah lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan guna memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Kelembagaan wakaf yang dimaksud nantinya memiliki tujuan agar pemanfaatan fungsi wakaf dapat mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari benda wakaf guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Beberapa langkah strategis yang dilakukan guna membangun nazir yang berkualitas dan profesional antara lain:

Pertama, membentuk sekolah-sekolah nazir baik formal, informal atau non formal sebagai upaya untuk peningkatan literasi dan wadah pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan skill para nazir. Para nazir ini nantinya akan mendapatkan sertifikasi sebagai bukti atas pencapaian yang diperoleh sehingga outpunya adalah menjadi nazir cakap dan

¹³ Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh DEPAG RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006, 114-118.

¹⁴Fadilah, S. (2015). Going Concern: An Implementation in Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment). Proceedings of the 2nd Global Conference on Bussiness and Social Science-2015 (pp.356-363). Bali, Indonesia

profesional. Sekolah-sekolah nazir ini nantinya dibentuk atas hubungan baik dari lembaga-lembaga yang terkait seperti BWI, Kementrian Agama atau lembaga-lembaga wakaf lainnya.

Nazir yang profesional juga berperan besar dalam upaya mengedukasi masyarakat. Peningkatan edukasi dan literasi yang hubungannya dengan wakaf menjadi salah satu hal yang utama dan harus segera diperbaiki serta dilaksanakan pada semua lini atau lembaga yang terkait dengan wakaf.

Kedua, menjadikan nazir sebagai profesi utama bukan menjadi sebuah sampingan. Permasalahan profesi nazir yang masih belum menjadi prioritas utama atau pekerjaan utama adalah salah satu permasalahan yang perlu untuk diperbaiki. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna menanggulangi permasalahan yang dimaksud adalah dengan peningkatan insentif, pemberian tunjangan hidup atau fasilitas lain yang menyejahterkan nazir.

Ketiga, penguatan regulasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji kembali undang-undang yang ada terkait dengan wakaf, pengembangan aset wakaf dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Dalam kasus ini, perlu adanya sebuah kerjasama dari pihak-pihak seperti BWI atau Kementrian Agama dan lembaga-lembaga wakaf yang ada. Penguatan regulasi yang dimaksud menjadi langkah awal dalam perbaikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan wakaf sehingga kedepannya hal-hal yang berhubungan dengan wakaf dapat dilaksanakan dengan baik.

Keempat, penguatan kelembagaan nazir akan memiliki dampak pada aset wakaf yang dikelola. Sehingga memiliki tujuan wakif dalam mewakafkan harta atau asetnya dapat tersalurkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas nazir adalah hal yang harus menjadi sebuah fokus utama. Kualitas nazir yang baik akan memiliki dampak pada *fundraising* dana wakaf, serta meningkatkan kepercayaan bagi si wakif.

Optimalisasi Sinergitas dengan Lembaga Terkait

Bahan utama

Pemberdayaan dalam wakaf berhubungan erat dengan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Kesejahteraan didalam ajaran Islam mengajarkan keseimbangan antara pencapain dunia dan pengharapan di akhirat.¹⁵ Didalam penerapan

¹⁵Pemaksimalan harta wakaf ini selaras dengan semangat sistem ekonomi yang dibangun oleh Islam. Didalam konsep pembangunan sistem ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi asas kesinambungan yang adil antara hak individu dan masyarakat. Kedua elemen tersebut harus berada dalam neraca keseimbangan yang adil antara urusan dunia dan akhirat agar menuju tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Lihat, Nasrulloh Ali

tersebut juga diperlukan kajian yang mendalam tentang kelompok sasaran yang akan mendapat dana wakaf. Hal tersebut terkait dengan potensi dan kondisi masyarakat yang dimaksud sehingga dapat tepat sasaran.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah modal pembangunan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian, dengan tujuan secara bertahap masyarakat mampu untuk membangun diri secara mandiri. Partisipasi dari lembaga lain yang terkait menjadi sebuah hal yang penting yang ada hubungannya dengan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan bagi masyarakat.

Konsep dari model pemberdayaan ekonomi ini dinilai lebih efektif jika dilakukan pada sekelompok masyarakat baik yang sudah terbentuk komunitas atau hanya sekumpulan masyarakat saja. Didalam aplikasinya ada tiga aspek yang perlu dielaborasi secara berkelanjutan yakni: *enabling*/ mengembangkan potensi yang sudah ada, *empowering*/memperkuat potensi yang sudah ada dan *protecting*/melindungi kepentingan masyarakat lemah.¹⁶

Guna mewujudkan hal tersebut, sinergisitas antar lembaga yang terkait merupakan hal yang wajib dan tidak boleh untuk diabaikan. Adapun upaya sinergisitas dapat dilakukan pada aspek regulasi, aspek bantuan hukum permodalan dan bantuan akses lainnya yang memudahkan program pemberdayaan wakaf yang dimaksud untuk dijalankan.

Penutup

Pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia dengan cara pengembangan aset wakaf akan lebih memberikan dampak yang terasa, salah satu bentuk ikhtiarnya adalah model pemberdayaan. Langkah ini dianggap strategis untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Tentu dalam hal tersebut harus secara aktif melibatkan masyarakat. Didalam aplikasinya ada tiga aspek yang perlu dielaborasi secara berkelanjutan yakni: *enabling*/ mengembangkan potensi yang sudah ada, *empowering*/memperkuat potensi yang sudah ada dan *protecting*/melindungi kepentingan masyarakat lemah. Selain itu sinergisitas antar lembaga yang terkait merupakan hal yang tidak boleh untuk diabaikan seperti sinergisitas pada aspek regulasi, aspek bantuan hukum permodalan dan bantuan akses lainnya yang memudahkan program pemberdayaan wakaf yang dimaksud untuk dijalankan.

Munif, *Sistem Ekonomi Islam: Dealektika Antara Thesis, Antitesis dan Plagiatis*, Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung Volume 2 Nomor 1 Edisi Oktober 2015, 129.

¹⁶Noor, M. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVI, 1(2), 87-99.

Daftar Pustaka

- Depag RI, Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta, 2006.
- Fadilah, S. Going Concern: *An Implementation in Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment). Proceedings of the 2nd Global Conference on Bussiness and Social Science-2015* (pp.356-363). Bali, Indonesia, 2015.
- Fuadi. *Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*. Economica, 9(1). 2018.
- Hasan, Thalhah, “Perlu Rekonsepsi Fikih Wakaf”, Republika, 30 April 2004.
- Jaih Mubarak, “Wakaf Produktif”, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Munif, Nasrulloh Ali, *Critical Analysis of Abu Yusuf Thought: The Role of Government in Islamic Economic*, Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah) STAI Muhammadiyah Tulungagung, Vol. 07 No. 01 Edisi Juni 2019.
- Munif, Nasrulloh Ali, *KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Visa a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter)*, Ahkam: Jurnal Hukum Islam IAIN Tulungagung, Volume 3 No 2 Edisi November 2015.
- Munif, Nasrulloh Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Dealektika Antara Thesis, Antitesis dan Plagiat*, Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung Volume 2 Nomor 1 Edisi Oktober 2015.
- Noor, M. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVI, 1(2). 2011.
- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh DEPAG RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006.
- Praja, Juhaya S., “Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya”. (Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Syamsul Anwar, “*Studi Hukum Islam Kontemporer*”, cet ke-1, Jakarta: RM Books, 2007.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.
- Zaidah, Y. (2012). *Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat Islam di Indonesia*. ATTARADHI: Jurnal Studi Islam, 3 (2).